

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeleminasi legitimasi *stakeholders* (Hadi, 2011).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Melalui *stakeholder theory* diharapkan pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pada *stakeholder* tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2002). Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* yaitu pemangku kepentingan internal yang terdiri dari para pegawai dan eksternal yang terdiri dari dewan perwakilan rakyat, para pembayar pajak, masyarakat dan LSM (Arifin, 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi

keberadaan pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktik akuntansi entitas. Pemangku kepentingan dan organisasi saling mempengaruhi dari hubungan sosial keduanya dalam bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas yang diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang handal, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Arifin, 2016).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Fahmi (2014:2) menyatakan “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”, sedangkan Harahap (2013:146), “Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, “tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemakainya guna untuk pengambilan keputusan”. Kualitas informasi LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yakni : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan LKPD. Adapun indikator tersebut adalah :

1. Relevan,

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan,

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Secara etimologis, Sistem Pengendalian Internal terdiri dari tiga kata yaitu sistem, pengendalian, dan internal yang memiliki arti kata masing-masing. Secara terminologis, sistem pengendalian internal. Secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah “menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) , Sistem Pengendalian Intern adalah :

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan tentang beberapa poin penting antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :
 - a. Lingkungan pengendalian;
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.
 - b. Penilaian risiko;
Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penilaian resiko terdiri dari :
 1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
 2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan

3. Identifikasi resiko
 4. Analisis resiko
 5. Mengelola resiko selama perubahan
- c. Kegiatan pengendalian;
- Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari :
1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
 2. Pembinaan sumber daya manusia;
 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 4. Pengendalian fisik aset;
 5. Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kerja;
 6. Pemisahan fungsi;
 7. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
- d. Informasi dan komunikasi;
- Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- e. Pemantauan.
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:
1. Pemantauan berkelanjutan
 2. Evaluasi terpisah
 3. Penyelesaian audit.

2.1.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan, “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Sedangkan Periansya (2018), “Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.

Ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi menurut Muhi (2016:157), yaitu :

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.

3. Sikap (*attitude*)”.

Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

2.1.4.1 Prinsip Kompetensi

Indikator pendidikan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal pegawai, kesesuaian kompetensi bidang pendidikan, serta kemampuan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

a. Pendidikan dan Pelatihan

Rachmawati (2008:117) dalam manajemen sumber daya manusia menjelaskan bahwa:

“Pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral dalam pengembangan karyawan. Pelatihan dalam bentuk yang kompleks diberikan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka di mana akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai sasarnya. Sementara kegiatan pendidikan diberikan untuk memperoleh pengetahuan yang akan meningkatkan kinerja karyawan serta akan membantu organisasi mencapai sasaran”.

b. Pengalaman Kerja.

Amin (2016:99), “Pengalaman memiliki makna pengamatan atau partisipasi langsung dengan sebuah kegiatan, sehingga pengalaman kerja seseorang berhubungan dengan masyarakat”. Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Mulyanto (2009:43), teknologi informasi merupakan “perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi”. Teknologi informasi menurut Lantip (2011:1), merupakan “ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai hal seperti sistem komputer *hardware* dan

software, LAN (local area network), MAN (metropolitan area network) WAN (wide area network).”

Widuri (2010:27), pemanfaatan teknologi informasi merupakan :

“penggunaan teknologi informasi bersangkutan oleh pengguna melalui sistem informasi berbasis komputer dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang dihadapi pengguna dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, baik secara individual, kelompok maupun organisasi, dengan memfokuskan pada level individu, khususnya *end user computing*”.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam akuntansi menurut Jurnal dan Supomo (2002), “teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini masih menjadi perhatian, diantaranya :

- a. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- c. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- d. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- e. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- g. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- h. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (Jurnal:2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.	Independen: $X_1 =$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah $X_2 =$ Pemanfaatan Teknologi Informasi $X_3 =$ Sistem Pengendalian Intern Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Munasyir (Jurnal:2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara	$X_1 =$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan $X_2 =$ Sistem Pengendalian Intern	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	
3	Dhedy Triwardana (Jurnal:2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kampar	$X_1 =$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan $X_2 =$ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah $X_3 =$ Kompetensi Sumber Daya Manusia Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Surya Adhitama (Jurnal:2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten Ogan Ilir)	$X_1 =$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah $X_2 =$ Sistem Akuntansi Keuangan Daerah $X_3 =$ Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			SDM Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	
5	Mia Oktarina, Kharis Raharjo, Rita Andini (Jurnal :2016)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang	Independen: $X_1 =$ Standar Akuntansi Pemerintahan $X_2 =$ Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah $X_3 =$ Good Governance Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Good Governance daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Brendhi Septo Nugroho (Jurnal: 2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)	<p>Independen:</p> <p>$X_1 =$ Penerapan SAP</p> <p>$X_2 =$ Kompetensi SDM</p> <p>$X_3 =$ Sistem Pengendalian Intern</p> <p>$X_4 =$ Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>$X_5 =$ Komitmen Organisasi</p> <p>Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 5. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Asyiyhatul Latifah (Jurnal: 2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bantul)	Independen: $X_1 =$ Penerapan SAP $X_2 =$ SAKD $X_3 =$ Kompetensi SDM $X_4 =$ Sistem Pengendalian Intern Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. 2. SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. 3. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. 4. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah.
8	Mayang Wulandari (Jurnal:2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Independen: $X_1 =$ Standar Akuntansi Pemerintahan $X_2 =$ Kompetensi Sumber Daya Manusia Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan 2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Solok Selatan 3. Interaksi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. 4. Interaksi kompetensi sumber

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p>
9	Asri Yunita, (Jurnal:2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)	<p>Independen:</p> <p>$X_1 =$ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>$X_2 =$ Sistem Pengendalian Internal</p> <p>$X_3 =$ Kompetensi Staf Akuntansi</p> <p>Dependen:</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Agum Gumelar (Jurnal:2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kerinci)	Independen: X ₁ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₂ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X ₃ = Sistem Pengendalian Intern Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Diolah Peneliti 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu SPI, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen pada BPKAD Kota Palembang.

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sukmaningrum (2012), “sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah”. Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Jadi, penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu. Dengan adanya kompetensi aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus

disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146).

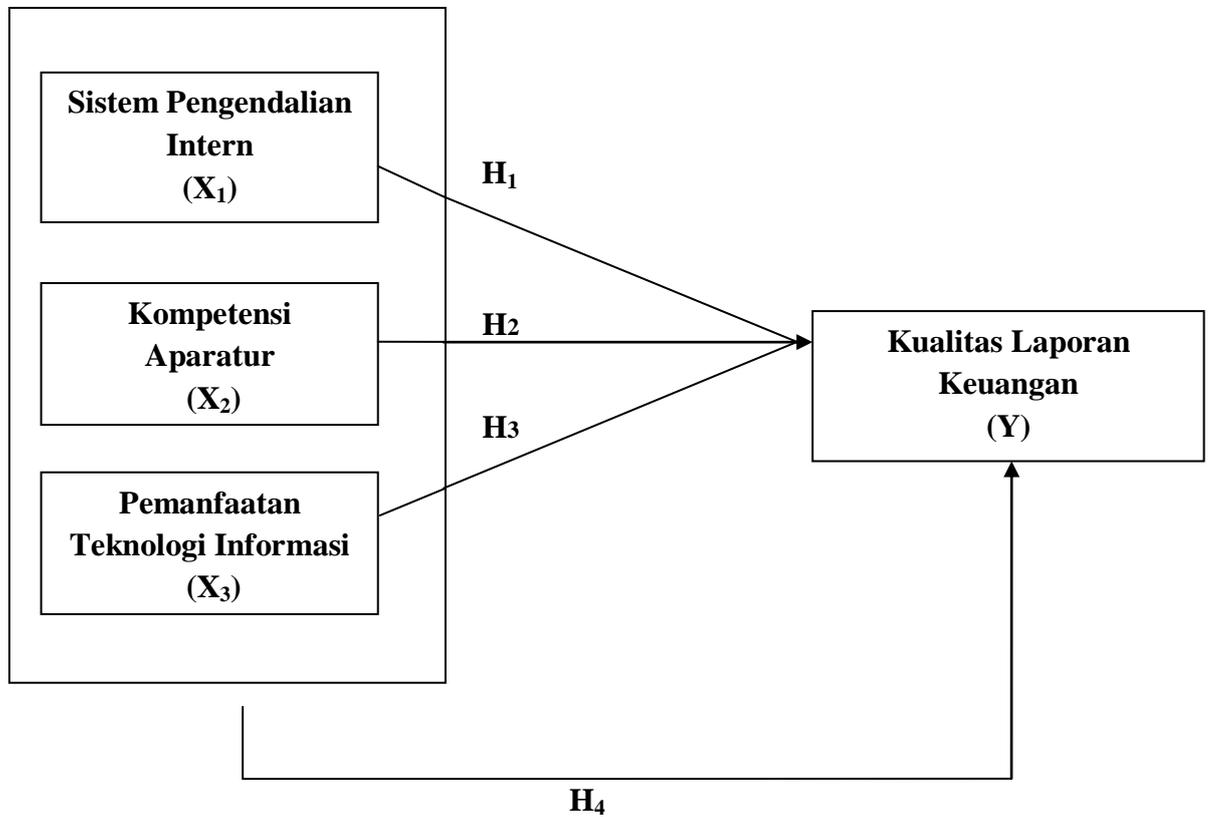
Desiana Wati (2014), sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi, jika sumber daya manusia memiliki keahlian dibidangnya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mustafa (2011), adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.

Nurillah (2014), “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Pemanfaatan teknologi informasi telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menunjukkan SKPD Kabupaten Halmahera Utara telah didukung teknologi, baik *software* dan *hardware* dalam hal menjalankan kegiatan organisasinya. Jadi, dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
- H₂ : Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
- H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
- H₄ : Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.